Persepsi Pengurus Partai terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

JRAK
3,1

363

Masiyah Kholmi

Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur

Jl. Raya Tlogomas 246 Malang

Email: masiyahkholmi@gmail.com

Abstract

This research has a purpose to obtain the political party leaders perception on the financial accountability of the party in Jombang District Board. Survey method was conducted to 17 respondents by using purposive sampling. Descriptive analysis using frequency test was also conducted. This research used scheme of financial accountability was categorized to 3 groups; financial accountability within the organization (10 items); financial accountability of the campaign finance (12 items); and the annual financial accountability (7 items). The results shows that political party leaders perception on the financial accountability 47,26% very much agrees, 43,24% agree, 7,19% not agree, and 2,31 % very disagree.

Keywords: *Perception, financial accountability, political parties, party officials.*

PENDAHULUAN

Era demokrasi dan reformasi di Indonesia tahun 1998 nampak dari adanya perluasan hak-hak politik rakyat, salah satunya adalah kemunculan banyak partai politik. Sekitar 148 partai politik terdaftar, 48 partai politik berhak mengikuti pemilu 1999, tercatat 24 partai politik yang berhak mengikuti kompetisi untuk pemilu 2004, dan sejumlah 38 partai politik berhak mengikuti pemilu 2009. Munculnya partai-partai di Indonesia tidak otomatis proposional dengan tingkat kepercayaan rakyat kepada partai politik dan kinerja partai politik itu sendiri.

Fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dibuktikan dengan berbagai tindakan masyarakat. Salah satu tindakan masyarakat berupa ‘tidak menggunakan hak pilihnya (menjadi golongan putih) atau dengan sebutan “golput” dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif. Hasil survey Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM) pada masyarakat Kota Makassar (Yani, 2007) yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) pada bulan November hingga Desember 2006 menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi percaya pada parpol. Menurut Lingkaran Survei Indonesia (Azwar, 2008), rata-rata tingkat golput pemilu legislatif (15,9 persen), pemilihan presiden tahap I (21,5 persen) dan pemilihan presiden tahap II (23,3 persen).

Sehubungan dengan hal di atas, Swift (2001) menyatakan bahwa ketidakpercayaan terhadap organisasi merupakan alasan fundamental atas permintaan terhadap akuntabilitas perusahaan. Akuntabilitas secara fundamental adalah mengenai pengungkapan (*disclosure*) terhadap informasi publik kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk mengetahuinya. Akuntabilitas (informasi yang disediakan

Jurnal Reviu Akuntansi
dan Keuangan

ISSN: 2088-0685

Vol.3 No. 1, April 2013

Pp 363-371

bagi *stakeholders*) diperlukan dan penting dalam situasi, dimana tidak terdapat kepercayaan (Gray *at el.*, 1997).

Media masa mengkritik bahwa akuntabilitas keuangan partai politik lemah (Masduki, 2009; Radikun dkk., 2008). Hasil penelitian Kholmi (2008) menunjukkan bahwa menurut persepsi mahasiswa akuntansi, akuntabilitas keuangan partai politik adalah rendah, sedangkan menurut persepsi konstituen bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan dana kampanye dan pelaporan keuangan tahunan partai politik dalam kategori sedang (36,10%; 36,80%) dan kategori tinggi (5,30%; 5,70%) (Kholmi, 2010). Selain itu, Simanjuntak (2009) juga mengungkapkan bahwa partai politik miskin akuntabilitas. Dengan partai politik yang kurang akuntabel, akibatnya timbul berbagai masalah seperti *money politic*, banyaknya korupsi yang bersumber dari oknum (elit) politik.

Partai politik berfungsi sebagai suatu organisasi yang berkompetisi membentuk pemerintahan Indonesia, dengan demikian *frame* pembangunan pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia sangat diwarnai oleh cerminan wajah partai politik. Oleh karena itu, tata kelola partai politik di Indonesia perlu segera dilakukan pembenahan secara fundamental, yaitu "membangun akuntabilitas institusinya". Membangun akuntabilitas partai politik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga terdapat upaya yang dilakukan terus menerus dari berbagai pihak misalnya Partai Politik, Pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum.

Kajian berkaitan dengan akuntabilitas dan keuangan partai politik di Indonesia telah dilakukan, seperti Radikun, dkk., (2008), Husodo (2009), Kholmi (2008, 2010), Ichwanuddin (2009), Masduki (2009), Rizal (2010), namun kajian tentang indikator akuntabilitas keuangan partai politik di Indonesia belum banyak dilakukan. Krina (2003) telah melakukan kajian tentang indikator akuntabilitas sektor publik yang berhubungan dengan akuntabilitas dalam bidang pelayanan publik dan administrasi publik dan tidak bermaksud untuk membahas tentang akuntabilitas keuangan. Sedangkan kajian ini berhubungan dengan akuntabilitas dalam bidang keuangan partai politik dan fokus pada indikator akuntabilitas keuangan dalam pandangan pengurus partai. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji persepsi pengurus partai terhadap akuntabilitas keuangan partai politik.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah pengurus partai pada Dewan Pimpinan Daerah di Kabupaten Jombang. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Responden yang digunakan penelitian ini merupakan tujuh besar partai politik yang terpilih sebagai peserta Pemilu Tahun 2009, yaitu Demokrat, PDI, Golkar, PKS, PAN, PKB, dan PPP.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penyebaran kuisisioner. Kuisisioner dibagikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat, PDI, Golkar, PKS, PAN, PKB, dan PPP. Masing-masing partai dikirim 5 (lima) kuisisioner. Jadi sampel penelitian 35 kuisisioner yang disebar kepada pengurus partai politik, meliputi: ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris, bendahara.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan partai politik. Tipe akuntabilitas keuangan partai politik mengadopsi hasil penelitian Kholmi (2011). Akuntabilitas keuangan dikategorikan dalam 3 tipe, yaitu akuntabilitas keuangan tahunan (10 item), akuntabilitas keuangan dana kampanye (12 item),

dan akuntabilitas keuangan yang bersumber dari dana APBD (7 item). Pertanyaan penelitian menggunakan model skala likert, yaitu mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju dengan skor 1,2,3, dan 4. Item pertanyaan dalam penelitian ini adalah pengembangan penelitian yang digunakan oleh Kholmi (2008, 2010).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan non-hipotesis sehingga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Karena itu dilakukan uji frekuensi terhadap setiap pertanyaan dan kelompok pertanyaan. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang telah dikelompokkan atas jawaban responden berdasarkan frekuensi tertentu yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi data

Pada penelitian ini disebar sebanyak 35 kuisioner secara langsung kepada responden pada tujuh besar partai politik (Demokrat, PDI, Golkar, PKS, PAN, PKB, PPP). Dari jumlah tersebut 2 partai politik tidak bersedia. Dan jumlah kuisioner yang kembali sebanyak 17 dan 18 kuisioner tidak kembali.

Pengujian frekuensi

Uji frekuensi dilakukan untuk mengetahui persentase dari jawaban responden. Uji frekuensi terhadap setiap pertanyaan disajikan pada Tabel 1.

Keterangan	STS*	TS	S	SS
Indikator Akuntabilitas Keuangan Tahunan				
1. Partai melakukan penyusunan program dan Rencana keuangan	17,65%	-	23,53%	58,82%
2. Partai melakukan pencatatan keuangan organisasi	11,76%	-	23,53%	64,71%
3. Penerimaan dana dari (iuran) anggota dimasukkan rekening partai	-	7,14%	42,86%	50%
4. Penarikan dana dari rekening bank ditanda tangani oleh ketua partai	-	23,53%	35,29%	41,18%
5. Dana kegiatan partai sesuai dengan rencana	-	5,88%	41,18%	52,94%
6. Pengelolaan keuangan sesuai dengan AD & ART	-	5,88%	58,82%	35,29%
7. Partai membuat laporan keuangan organisasi setiap akhir tahun	-	5,88%	23,53%	70,59%
8. Partai menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	-	- 11,76%	41,18%	47,06%
9. Laporan keuangan organisasi telah diaudit/diperiksa oleh pihak yang berwenang (auditor)	-	11,76%	23,53%	64,71%
10. Partai membuat laporan pertanggung-jawaban pada akhir periode (tahunan)	-	-	35,29%	64,71%
Total	29,41%	71,83%	348,74%	550,01%
Persentase	2,94%	7,18%	34,87%	55,01 %

Tabel 1
Pengujian Frekuensi

*STS : Sangat tidak setuju
TS : Tidak setuju
S : Setuju
SS : Sangat setuju

Karakteristik
Proses....

366

Keterangan	STS*	TS	S	SS
Indikator Akuntabilitas Keuangan Dana Kampanye				
1. Partai membuat rekening khusus dana kampanye	17,65%	-	47,06%	35,29%
2. Partai memberikan laporan awal dana kampanye ke KPU	-	47,06%	58,82%	41,18%
3. Partai melaporkan daftar sumber penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang ke KPU	-	17,65%	47,06%	5,88%
4. Partai melaporkan daftar sumber penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan jasa ke KPU	-	11,76%	70,59%	11,76%
5. Partai melakukan pencatatan keuangan dana kampanye	-	17,65%	47,06%	41,18%
6. Partai melaporkan daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye	-	11,70%	35,29%	47,06%
7. Partai menyusun laporan keuangan dana kampanye mengacu pada peraturan KPU	-	12,50%	42,86%	45,44%
8. Partai memberikan laporan saldo akhir dana kampanye ke KPU	-	-	37,50%	50%
9. Laporan keuangan dana kampanye di audit oleh	-	11,76%	43,75%	56,25%
10. Partai membuat pelaporan pertanggungjawaban dana kampanye ke KPU	-	-	82,36%	5,88%
11. Laporan keuangan dana kampanye dapat diakses secara mudah oleh donatur/penyumbang	-	12,50%	43,75%	56,25%
12. Laporan keuangan dana kampanye dapat diakses secara mudah oleh publik (masyarakat)	-	-	37,50%	50%
Total	17,65%	142,58%	593,36%	446,17%
Persentase	1,47%	11,88%	49,47%	37,18%

Keterangan	STS*	TS	S	SS
Indikator Akuntabilitas Keuangan dari Dana APBD				
1. Partai memiliki rekening atas nama partai	17,65%	-	35,29%	47,06%
2. Partai melakukan pencatatan keuangan dari dana APBD	-	5,88%	52,94%	47,06%
3. Partai menyusun laporan keuangan sesuai Standar	-	5,88%	47,06%	47,06%
4. Akuntansi Keuangan (SAK) atau Peraturan Pemerintah	-	-	47,06%	47,06%
5. Periode pelaporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan pemerintah	-	-	47,06%	52,94%
6. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh BPK	-	-	47,06%	52,94%
7. Laporan pertanggungjawaban penerimaan & pengeluaran keuangan dari dana APBD per tahun ke pemerintah	-	-	47,06%	52,94%

8. Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan terbuka/dapat diakses oleh publik untuk diketahui masyarakat	-	5,88%	41,18%	52,94%
Total	17,65%	17,65%	317,65%	347,06%
Persentase	2,52%	2,52%	45,38%	49,58%

Ringkasan hasil pengujian frekuensi per kelompok atau berdasarkan tiga kategori yaitu akuntabilitas keuangan tahunan, akuntabilitas keuangan dana kampanye, dan akuntabilitas keuangan yang bersumber dari dana APBD disajikan sebagai berikut:

Keterangan	Sangat tdk setuju	Tidak setuju	Setuju	Sangat setuju	Total
A1*	2,94%	7,18%	34,87%	55,01 %	100%
A2	1,47%	11,88%	49,47%	37,18%	100%
A3	2,52%	2,52%	45,38%	49,58%	100%
Total	6,93%	21,58%	129,72%	141,77%	
Persentase	2,31 %	7,19 %	43,24 %	47,26%	100%

Tabel 2
Pengujian Frekuensi
per Kelompok

Keterangan

*A1 = Akuntabilitas Keuangan Tahunan

A2 = Akuntabilitas Keuangan Dana Kampanye

A3 = Akuntabilitas Keuangan dari Dana APBD

PEMBAHASAN

Persepsi pengurus partai tentang indikator akuntabilitas keuangan tahunan

Berdasarkan persepsi pengurus partai tentang indikator akuntabilitas keuangan organisasi (tahunan) dapat dijelaskan ke dalam sepuluh (10) item pertanyaan. Hasil analisis menunjukkan jawaban responden sangat setuju partai politik melakukan penyusunan program dan rencana keuangan (58,82%), partai melakukan pencatatan keuangan organisasi (64,71%), dana kegiatan partai sesuai dengan rencana (52,94%), partai membuat laporan keuangan organisasi setiap akhir tahun (70,59%) dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (47,06%) sangat setuju, 11,76 % jawaban responden tidak setuju. Responden sangat setuju laporan keuangan organisasi di audit dan partai membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir periode (tahun) masing-masing 64,71%.

Dari deskripsi tersebut, indikator akuntabilitas keuangan partai politik yang telah diajukan, hasil analisis menunjukkan 2,94% responden menjawab sangat tidak setuju, 7,18% responden menjawab tidak setuju, 34,87% responden menjawab setuju, dan 55,01% responden menjawab sangat setuju. Dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden menjawab sangat setuju yaitu sebesar 55,01%. Jawaban sangat setuju memberi arti bahwa menurut persepsi pengurus partai, indikator akuntabilitas keuangan tahunan diperlukan bagi organisasi partai politik.

Pengurus partai sangat setuju terkait dengan akuntabilitas keuangan organisasi partai politik, karena merupakan keharusan bagi partai sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 (ayat 5) Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2011, menyatakan Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.

Pengelolaan keuangan partai telah diatur di dalam pasal 39, UU No. 2 Tahun 2011, sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.
- (3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran Partai Politik;
 - b. laporan neraca; dan
 - c. laporan arus kas.

Menurut IAI (2009) dalam PSAK No. 45, tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Untuk itu, indikator akuntabilitas keuangan organisasi partai politik merupakan suatu keniscayaan bagi keberlangsungan kehidupan partai yang telah banyak menggunakan dana publik (masyarakat).

Persepsi pengurus partai tentang indikator akuntabilitas keuangan dana kampanye

Berdasarkan persepsi pengurus partai tentang indikator akuntabilitas keuangan dana kampanye dapat dijelaskan ke dalam sepuluh (12) item pertanyaan. Hasil analisis menunjukkan jawaban responden sebagian besar setuju partai politik membuat rekening khusus dan kampanye (47,06%), partai memberikan laporan awal dana kampanye (58,82%), partai membuat pelaporan pertanggungjawaban dana kampanye ke KPU (82,36), partai melaporkan daftar sumber penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang ke KPU 47,06% responden menjawab setuju dan 47,06% tidak setuju. Sebagian besar responden menjawab sangat setuju partai menyusun laporan keuangan dana kampanye mengacu pada peraturan KPU (45,44%), partai memberikan laporan saldo akhir dana kampanye ke KPU (50%), laporan keuangan dana kampanye di audit oleh KAP (56,25%), laporan keuangan dapat diakses oleh publik (masyarakat umum) (56,25%).

Dari deskripsi tersebut, indikator akuntabilitas keuangan dana kampanye yang telah diajukan, hasil analisis menunjukkan 1,47% responden menjawab sangat tidak setuju, 11,88% responden menjawab tidak setuju, 49,47% responden menjawab setuju, dan 37,18% responden menjawab sangat setuju. Dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebesar 49,47%. Jawaban setuju mengindikasikan bahwa menurut persepsi pengurus partai telah dilakukan pelaporan keuangan dana kampanye sebagai indikator akuntabilitas keuangan dana kampanye partai politik.

Terkait dengan pelaporan dana kampanye Pilkada, selain mengacu pada PSAK No. 45, juga mengacu pada Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Tanggung jawab dana kampanye berada di tangan pasangan calon, sedangkan tanggung jawab atas laporan dana kampanye berada di tangan tim kampanye pasangan calon atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (selanjutnya disebut LPPDK). LPPDK wajib dilaporkan oleh pasangan calon dan tim kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik, LPPDK beserta laporan pendukung terkait harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/Kabupaten.

Tuntutan akuntabilitas dana kampanye merupakan hal yang logis, sebagai entitas yang menggunakan dana bersumber dari sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta. Di samping itu, akuntabilitas sebagai bentuk kepa-

tuhan terhadap Undang-Undang Partai Politik serta Undang- Undang Pemilu. Seluruh sumber daya keuangan yang digunakan untuk dana kampanye sebuah partai politik harus dipertanggungjawabkan, yaitu penyampaian Laporan Dana Kampanye (peserta pemilu) yang telah diaudit Akuntan Publik ke KPU serta terbuka untuk diakses publik (Bastian, 2007: 156).

Persepsi pengurus partai tentang indikator akuntabilitas keuangan dari dana APBD

Berdasarkan persepsi pengurus partai tentang indikator akuntabilitas keuangan dana APBD dapat dijelaskan ke dalam tujuh (7) item pertanyaan. Hasil analisis menunjukkan jawaban responden sangat setuju, 47,06% partai memiliki rekening atas nama partai, partai melakukan pencatatan keuangan dari dana APBD, partai menyusun laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah, Periode pelaporan keuangan tahunan sesuai dengan ketetapan pemerintah. Jawaban responden sangat setuju, 52,94% laporan keuangan tahunan diaudit oleh BPK, Partai membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari dana APBD satu tahun sekali ke pemerintah, hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan terbuka/dapat diakses oleh publik untuk diketahui masyarakat.

Dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden menjawab sangat setuju yaitu sebesar 52,94%. Jawaban sangat setuju mengindikasikan bahwa menurut persepsi pengurus partai telah dilakukan pelaporan keuangan dana APBD sebagai indikator akuntabilitas keuangan partai politik. Hal ini telah dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2011, Di antara Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

Dari 29 item indikator akuntabilitas keuangan partai politik, **Gambar 1** mendeskripsikan prosentase jawaban responden, sebagai berikut:

Gambar 1
prosentase jawaban responden

Berdasarkan hasil persentase pada Gambar di atas menunjukkan 2,31 % responden menjawab sangat tidak setuju; 7,19% tidak setuju; 43,24% setuju; dan 47,26% sangat setuju. Dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden menjawab sangat setuju (47,26%). Hal ini menunjukkan bahwa pengurus partai politik menyetujui adanya indikator akuntabilitas keuangan partai politik berdasarkan tiga kategori akuntabilitas keuangan tahunan; akuntabilitas keuangan dana kampanye; dan akuntabilitas keuangan dana bantuan APBD.

Sebagai sebuah organisasi modern, partai politik dituntut untuk mengembangkan etika politik yang berdiri di atas nilai-nilai akuntabilitas dan menciptakan sistem *feedback* antara partai dan konstituen untuk mempermudah tuntutan akuntabilitas publik yang akan melahirkan kemudahan komunikasi dan partisipasi konstituen terhadap kebijakan partai politik tersebut (Wijaya, 2003). Terwujudnya akuntabilitas (keuangan) partai politik merupakan bagian yang strategis dalam meminimalisir tuduhan (buruk sangka) akan adanya praktik-praktik politik uang (*money politics*). Di samping itu, akuntabilitas merupakan sebuah langkah awal untuk mewujudkan *good governance* pada partai politik.

SIMPULAN

Dari deskripsi hasil pengujian frekuensi, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengurus partai politik sependapat untuk menerapkan tiga kategori akuntabilitas keuangan dalam mengelola organisasi partai politik, yaitu akuntabilitas keuangan tahunan; akuntabilitas keuangan dana kampanye; dan akuntabilitas keuangan dana bantuan APBD. Sebagian besar responden menjawab sangat setuju (47,26%) dan setuju (43,24 %) adanya akuntabilitas keuangan partai politik, tetapi masih terdapat pengurus partai sangat tidak setuju (2,31%) atas akuntabilitas keuangan partai politik. Dan sangat tidak setuju jika partai melakukan penyusunan program dan rencana keuangan, partai membuat rekening khusus dana kampanye, dan partai memiliki rekening atas nama partai masing-masing prosentase jawaban responden 17,65%.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan penelitian ini hanya fokus dari sudut pandang pengurus partai pada sebuah Dewan Pimpinan Daerah partai politik. Oleh sebab itu, untuk penelitian mendatang dapat dikembangkan dari sudut pandang yang lain (seperti penyumbang dana (donatur), konstituen, pemerintah, dan KPUD) sebagai pihak publik yang berkepentingan akan akuntabilitas keuangan partai politik. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, hal ini memungkinkan terjadinya bias karena responden cenderung kurang memberikan jawaban-jawaban dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, R.C. 2008. "Pengembangan SDM Partai Politik: Rekrutmen dan Kaderisasi di Partai Golkar, <http://www.parlemen.net> (diakses pada 9 April 2010)
- Bastian, I. 2007. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Gray, R., Dey, C., Owen, D., Evans, R. and Zadek, S. 1997. "Struggling with the praxis of social accounting, *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, 10:3, 325-364.

- Husodo, A.T.2009. "Manipulasi Laporan Dana Kampanye". <http://www.sumeks.co.id>. (diakses pada 30 Mei 2011).
- Ichwanuddin, W. 2009. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye dalam Pemilu 2009 (diakses pada 26 September 2009).
- IAI. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kholmi, M. 2008. Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Partai Politik. *Ekonomika-Bisnis, Jurnal Penelitian dan Pemikiran*, Juni 01 (02): 215-226.
- Kholmi, M. 2010. Persepsi Konstituen terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Agustus, **1** (2): 37-52.
- Kholmi, M. 2011. Tafsir Sosial atas Konsep Akuntabilitas dalam Perspektif Hermeneutika. Disertasi Universitas Brawijaya Malang, tidak dipublikasikan.
- Krina, L.L. 2003. "Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi" *Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, Agustus, Jakarta
- Masduki, T. 2009. "Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Lemah". <http://kanalpemilu.net> (diakses Nopember 2009).
- Radikun, R.P., Mahmudin, M., Ragil, K., 2008. *Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*. Diterbitkan Transparency International Indonesia Politik, Jakarta
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang Partai politik.
- _____. 2011. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
- _____. 2010. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Rizal,M. 2010. Akuntabilitas Dana Kampanye dan Keuangan Parpol. <http://www.larispa.com/default.asp/> (diakses 10 April 2010).
- Simanjuntak, D.A. 2009. *Partai politik miskin akuntabilitas*. <http://simanjuntak.Or.id/>. (diakses Maret 2010)
- Swift, T. 2001. Trust, reputation, and corporate accountability to stokeholders. *Business Ethics: A European Review* **10** (1): 16-26.
- Wijaya, Darma. 2003. *Pemilu 2004: Parpol dan Krisis Kepercayaan Pemilih*. Suara Merdeka 1 Agustus 2003.
- Yani, Andi Ahmad. 2007," *Calon Independen: Skenario Mendobrak Partitokrasi*, dimuat Harian Tribun Timur Makassar, 5 Juli 2007.